PERBARINDO
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.1711/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
JL RAYA NO 22 BANDUNGREJO MRANGGEN DEMAK

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 22 April 2022

PERBARINDO

MediaBPR
Fokus Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.1711/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
JL RAYA NO 22 BANDUNGREJO MRANGGEN DEMAK

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 22 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Kantor Pusat : Jl. Raya Bandungrejo No. 22, Mranggen, Demak (024) 6725568
Kantor Cabang : Jl. Veteran No. 46 B, Wonosobo - (0286) 324408
Kantor Kas : Jl. Raya Mranggen - Onggorawe Desa Bulusari Demak - 08132709534

Mranggen, 21 April 2022

No : 377.01 /BPR.AMAS/IV/2022
Hal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2021
Lamp : 1 (Satu) Bendel

Kepada Yth :
Ketua Umum DPD Perbarindo
Komp. Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Arthanugraha Makmursejahtera tahun 2021.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Perkreditan Rakyat
Arthanugraha Makmursejahtera
Mranggen – Demak

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
MRANGGEN - DEMAK

Teguh Imam Prabowo, ST. MM
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495381-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600587-20042022144314

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprarthanugraha@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-20 14:43:14

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
TAHUN 2021

Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
TELEPON: 024-6725568

BAB I
PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG- Good Corporate Govermence) pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera pada tahun 2021 telah membawa perkembangan positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan disepanjang tahun 2021 ditengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga Bank dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR.

Adapun yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan (Transparancy), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness). Dengan demikian dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perundang- undangan yang berlaku serta nilai- nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan secara terus menerus dan berkesinambungan.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Teguh Imam Prabowo, ST, MM
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menjalankan pengelolaan dan pengurusan perusahaan. 2. Menjalankan semua aktivitas & kegiatan operasional BPR penuh dengan tanggungjawab sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, perundang- undangan yang berlaku serta kebijakan internal BPR. 3. Mengkoordinasi, memimpin, dan mensupervisi seluruh kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 4. Menyelenggarakan rapat pada saat dipandang perlu atas permintaan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 5. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana dan penyaluran kredit sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direksi. 6. Melaksanakan kegiatan evaluasi secara rutin untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan praktek organisasi di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. 7. Menandatangani surat-surat berharga atas nama BPR serta memo-memo, warkat-warkat yang telah diparaf oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan BPR. 8. Menetapkan, memutuskan, menyetujui, dan memerintahkan pengeluaran uang dalam rangka realisasi kredit maupun untuk keperluan operasional kantor. 9. Menetapkan, menyetujui, dan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penarikan, penyetoran, dan pemindahbukuan.		
2.	Nama	:	Sundari, S.Kom
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada dalam melaksanakan Tata Kelola BPR yang telah ditetapkan manajemen. 3. Memantau seluruh laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yang menjadi kewajiban BPR yang berhubungan erat dengan fungsi kepatuhan. 4. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. 5. Menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 6. Memberikan saran dan masukan kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang berhubungan erat dengan pelaksanaan Tata Kelola BPR. 7. Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka optimalisasi dalam menjalankan Tata Kelola secara menyeluruh dalam organisasi. 8. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan Tata Kelola BPR guna menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat		

	menimbulkan kerugian bagi BPR. 9. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan Umum, Personalia, Keamanan dan kegiatan Pramubakti bersama-sama dengan Bagian Umum & SDM dan jajarannya untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip dasar Tata Kelola BPR. 10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
a. Temuan pemeriksaan OJK posisi per 31 Maret 2021 telah tuntas ditindaklanjuti sampai dengan 24 September 2021. b. Telah dilakukan evaluasi penyesuaian Laporan Rencana Bisnis tahun 2021 dan telah dikirim ke OJK pada tanggal 13 Maret 2021. c. Dengan terbitnya POJK No. 62/ POJK.03/2020, Bank telah mengevaluasi Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Perusahaan dan memastikan Anggaran Dasar yang terakhir telah sesuai dengan POJK tersebut. d. Telah ditindak lanjuti terkait peningkatan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) sehingga dapat expansi kredit dengan bunga yang rendah.	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Dewan Komisaris melakukan pengawasan rutin terhadap realisasi rencana bisnis periode januari - desember 2021.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Kholidah, SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1) Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 3) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 4) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang : a. Pengaturan etika kerja; b. Waktu kerja; dan c. Pengaturan rapat.		
2.	Nama	:	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

1) Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 3) Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan. 4) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang : a. Pengaturan etika kerja; b. Waktu kerja; dan c. Pengaturan rapat.
Rekomendasi Kepada Direksi :
Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi. Disamping mengawasi tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisari terhadap Direksi, Dewan Komisaris ikut aktif dalam pengawasan kepada BPR baik melalui kunjungan langsung ke Kantor BPR Arthanugraha Makmursejahtera maupun lewat laporan-laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Serta rekomendasi yang telah diusulkan kepada Direksi.
Penjelasan Lebih Lanjut :

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	Rp1.215.000.000,00	22.19%
2.	Sundari, S.Kom	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direktur Kepatuhan tidak memiliki saham pada PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	600531	PT. BPR Citra Darian	17.5%
2.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	601446	PT. BPR Dhana Adiwerna	17.5%
3.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	600575	PT. BPR Weleri Jayapersada	3.84%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Sundari, S.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Teguh Imam Prabowo, ST, MM	Tidak ada	Kholidah, SE - Saudara perempuan dari orangtua	Tidak ada
2.	Sundari, S.Kom	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direktur Utama dengan Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Saudara perempuan dari orangtua, sedangkan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kholidah, SE	Rp0,00	0%
2.	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kholidah, SE			
2.	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kholidah, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Kholidah, SE	Teguh Imam Prabowo, ST, MM - Anak dari saudara	Tidak ada	Tidak ada
2.	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama dengan Direktur Utama memiliki hubungan keluarga yaitu Anak dari saudara laki-laki (keponakan).				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	0	Rp0,00	0	Rp0,00
2.	Tunjangan	0	Rp0,00	0	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp0,00		Rp0,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (2)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Handphone (1)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Remunerasi yang diberikan kepada pengurus telah mendapat persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.69 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.6 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.16 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.66 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.93 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang diperbandingkan dalan Rasio Gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Diresi, dan pegawai perbulan dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	13 Januari 2021	4	a. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menjalankan Audit Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 b. Perencanaan pelaksanaan RUPS di bulan Januari 2021 terkait pelaksanaan Audit yang akan dijalankan pada 8 Februari 2021 c. Perencanaan pelaksanaan RUPS terkait pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Utama d. Merencanakan penambahan tenaga marketing kredit untuk Kantor Cabng Wonosobo
2.	06 Maret 2021	4	a. Merevisi RBB penyesuaian tahun 2021 yang akan disampaikan OJK paling lambat 10 hari kerja dari surat diterima OJK b. Perencanaan perpanjangan sewa gedung yang akan habis pada bulan Mei 2021 c. Rencana pengajuan Linkage ke Bank Jateng d. Tindak lanjut pelaksanaan asuransi kredit untuk debitur dengan plafond kredit minimal Rp. 50.000.000,-
3.	27 April 2021	4	a. Mengaktifkan kembali Whatsapp Banking dengan tujuan untuk mengingatkan nasabah jatuh tempo dan dapat memitigasi risiko Kredit non lancar b. Monitoring pencairan kredit terhadap nasabah pada H+2 setelah pencairan serta untuk meningkatkan konfirmasi pelayanan Bank terhadap kredit c. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga baik berupa tabungan maupun deposito yang dilakukan oleh marketing dana

			d. Monitoring tindak lanjut atas komitmen-komitmen yang akan disampaikan ke OJK
4.	25 Mei 2021	4	a. Usulan distribusi laba tahun 2020 dialokasikan ke Cadangan Umum, zakat, deviden dan jasa produksi b. Usulan mengadakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang APU PPT yang dilakukan secara intern c. Usulan uang duka dan tali asih untuk Pengurus dan Keluarga inti (suami/istri dan anak) yang sakit atau meninggal dunia d. Memastikan Anggaran Dasar Rumah Tangga Perusahaan yang terakhir apakah telah sesuai dengan POJK No. 62/POJK.03/2020
5.	15 November 2021	4	a. Mengevaluasi pencapaian target Rencana Bisnis sampai dengan bulan Oktober 2021 yang akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBB tahun 2022 b. Bank berencana membeli jaminan kredit bermasalah dan hal tersebut sesuai ketentuan atau keputusan MK pada bulan September 2021
6.	10 Desember 2021	4	a. Penetapan dan menyetujui RBB tahun 2022 yang akan disampaikan ke OJK maksimal tanggal 22 Desember 2021 b. Membahas tindak lanjut pengambilalihan jaminan kredit bermasalah c. Membahas Action Plan penyelesaian kredit bermasalah untuk menurunkan NPL
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Nihil			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Kholidah, SE	6	0	100%
2.	WinarnoHadiredjo, SE, Akt, CA, CPA	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris hadir dalam setiap pelaksanaan rapat dengan Direksi.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Nihil								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	14 April 2021	Sosial	Partisipasi	Lembaga Swadaya Masyarakat Bumi Pertiwi	Rp100.000,00
2.	06 Mei 2021	Sosial	Partisipasi Keamanan	Koramil Kecamatan Mranggen	Rp250.000,00
3.	27 Juli 2021	Sosial	Santunan Dukacita	Nasabah	Rp250.000,00
4.	30 November 2021	Sosial	Partisipasi Sepak bola	Club Sepak Bola Bandungrejo	Rp100.000,00
5.	10 Desember 2021	Sosial	Partisipasi Hari Jadi BPR Guru Jateng	BPR Guru Jateng	Rp500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil					

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA
Alamat	:	Jl. Raya No. 22 Bandungrejo Mranggen Demak
Nomor Telepon	:	024-6725568
Posisi Laporan	:	Desember 2021
Modal Inti	:	Rp7.292.590.189,00
Total Aset	:	Rp41.897.970.712,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.45	0.29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.9	0.19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.05	0.205
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.6	0.04
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.84	0.284
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.8	0.135
Nilai Komposit			**1.8**
Predikat Komposit			**Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.45)

Bank telah memiliki 2 (dua) orang Anggota Direksi, dan salah satunya menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan seluruh anggota Direksi telah lulus dalam penilaian Fit and Proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Bank telah memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus hasil penilaian fit and proper sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Bank telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan. Selama tahun 2021 tidak ditemukan adanya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

Bank telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah menunjuk (Pjs) PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.05)

Bank telah memiliki pedoman mengenai Audit Intern dan telah menunjuk (Pjs) Pejabat Eksekutif audit intern.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)

Penerapan audit ekstern, Bank telah menunjuk KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi dari Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.84)

Bank telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

Bank telah memiliki kebijakan mengenai BMPK, proses pemberian kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi, disetujui Komisaris dan disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online

OJK (APOLO).

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.8)

Bank telah menyusun laporan publikasi, laporan tahunan, laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Aspek Governance Structure adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tuga spokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik.

Faktor Aspek Governance Process yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko.

Faktor Aspek Governance Output bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai.

Demak, 14 April 2022

PT. BPR ARTHANUGRAHA MAKMURSEJAHTERA

Menyetujui

Teguh Imam Prabowo, ST, MM	**Kholidah, SE**
Direktur Utama	Komisaris Utama